

**SISTEM KOMUNIKASI INDONESIA DI ERA DIGITAL
(SEBUAH KAJIAN LITERATUR)****Salomon Andreas Mesak Babys¹, Pangi Syarwi Chaniago², Giovani M. Babys³**^{1,2}Dosen Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Bung Karno

³Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Bung Karno

E-mail: salomonbabys@gmail.com**ABSTRACT**

Each country builds its own communication system according to the needs and demands of its progress and development. Pancasila as a state ideology can be used as a basic framework for building a national communication system and can even be developed into a national communication paradigm. The purpose of this study is to explain whether the Indonesian communication system exists and refers to or is based on Pancasila values and how the Pancasila communication system is operationalized in Indonesia. The theory used is the theory of communication systems and the Pancasila communication system. This research method uses a qualitative method with a literature study type. The results of the study explain that the Pancasila communication system has been tested and developed since the beginning, but political and social dynamics distorted it until the communication system was constructed based on alternating leadership styles from period to period. The Indonesian communication system is a Pancasila communication system because it is a system built on the values of Pancasila as the basis and ideology of the state, secondly that the Pancasila communication system is open, the operation of the Pancasila communication system emphasizes all dimensions of the lives of individual humans, society, government institutions must be able to translate the operationalization of the Pancasila communication system in all fields and patterns as a standard system that is more useful and very useful for the progress of the nation's civilization in a sustainable manner. Suggestion It is necessary to build a Pancasila communication study center at Bung Karno University.

Keywords: sistem; komunikasi; Indonesia:digital

PENDAHULUAN

Secara keilmuan sistem komunikasi merupakan satu kesatuan konsep, teori, nilai yang menegaskan perihal proses komunikasi pada sistem sosial masyarakat, penggunaan teknologi komunikasi, substansi-substansi komunikasi, dan pelembagaan lembaga komunikasi, termasuk segala landasan hukum yang memoderasi komunikasi. Secara umum Sistem komunikasi bisa juga diartikan sebagai seluruh hal yang terikat

meliputi komponen manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, prosedur, model atau strategi yang digunakan oleh suatu komunitas lokal, nasional maupun global untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan data menjadi informasi penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan, proses manajemen, proses komunikasi efektif dalam komunitas, organisasi maupun masyarakat nasional dan internasional.

Setiap negara membangun sistem komunikasinya sendiri sesuai kebutuhan serta tuntutan terhadap kemajuan dan perkembangannya. Sistem komunikasi biasa dikonstruksi sesuai nilai kebangsaannya sendiri-sendiri. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia berfungsi sebagai pedoman politik dan hukum dari bangsa dan negara Indonesia, sehingga pancasila juga dapat dikatakan sebagai kerangka dasar pembangunan model, strategi komunikasi sosial masyarakat. Sebagai kerangka dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. pancasila menjadi kerangka dasar komunikasi untuk komunitas kebangsaan Indonesia. Pada kondisi tersebut maka komunikasi dalam perspektif pancasila harus dipahami sebagai proses ideologis yang menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara, dan dalam pemahaman tersebut maka pancasila harus dapat dijadikan sebagai suatu kerangka pemikiran sistem komunikasi Indonesia, hingga bisa dikembangkan menjadi paradigma komunikasi nasional.

Manusia sebagai makhluk komunikasi menekankan urgensi komunikasi manusia, dan proses komunikasi yang dijalankan sebagai suatu kegiatan kodrati tersebut pada akhirnya akan membentuk sistem komunikasi yang kemudian secara dinamis berubah dan berkembang dengan problem-problem yang dialami. Beberapa problem dalam sistem komunikasi yang terjadi seperti yang disampaikan (Kusuma:2019:1) adalah bahwa perkembangan sistem informasi dan komunikasi di Indonesia, tidak otomatis meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik antar sesama manusia, sebaliknya komunikasi dijalankan secara tidak terstruktur juga sering terjadi sehingga pada akhirnya menimbulkan sikap atau perilaku intoleran dan antisosial yang meresahkan kehidupan bermasyarakat.

Sistem komunikasi yang buruk bisa menciptakan perpecahan. Kusuma (2019:1) menyatakan bahwa banyaknya informasi pada media digital menyebabkan disinformasi yang memperuncing proses perpecahan masyarakat dalam kutub-kutub homogenitas sektarian. Pada konteks tersebut lah orang tidak terbiasa dengan perbedaan

dan tidak terlatih melihat persoalan dari berbagai sisi yang berbeda. Dikatakan bahwa proses transformasi komunikasi yang berlangsung dengan model komunikasi multilayer saat ini malah telah menghasilkan manusia yang lebih individualisme dan komunalisme, yang mengarah pada perilaku intoleran dan antisosial.

Realitas buruknya komunikasi oleh para birokrat regim pemerintahan baik level pusat sampai daerah, buruknya komunikasi publik pada pusat-pusat lembaga pelayanan publik di Indonesia, bahkan buruknya pelayanan aparaturnya penegakan hukum di Indonesia, baik pada lembaga yudikatif maupun pelaksana penegakan hukum polri dan keamanan negara oleh TNI merupakan kondisi ekstrim dari rendahnya mutu dan kualitas sistem komunikasi yang dibangun dan digunakan oleh birokrat di Indonesia saat ini, dan hal tersebut bukan hanya menunjukkan perihalnya adanya titik lemah dari sistem komunikasi yang dikembangkan di Indonesia, tapi lebih jauh menunjukkan belum rampungnya pembangunan sistem komunikasi dan informasi yang efektif dan efisien serta berkualitas untuk suatu bangsa berkembang seperti Indonesia yang multikultural, dan merupakan negara kepulauan.

Sistem komunikasi menjadi penentu dari kemajuan peradaban manusia, sistem komunikasi yang buruk menciptakan kekacauan (*chaos*). Berdasarkan catatan sejarah kita bisa memahami bagaimana sistem komunikasi yang buruk pada level global berdampak pada kehidupan nasional bangsa-bangsa di dunia, hal mana kemudian komunikasi menjadi sumber konflik atau perang, sarana bisnis yang eksploitatif, bahkan dijadikan sebagai media penguasaan secara moderen seperti yang terjadi saat ini, dimana penjajahan gaya baru melalui digital semakin masif. Bahkan kita tahu bahwa pengembangan sistem komunikasi saat ini dikembangkan hanya untuk kepentingan penguasa global negara-negara maju yang mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga sarana komunikasi menjadi media propaganda, penyesatan dan penghancuran informasi publik berbasis digital pada negara-negara miskin atau berkembang untuk menciptakan ketergantungan absolut pada negara maju.

Di atas sejarah panjang buruknya sistem komunikasi global yang menelurkan konflik, peperangan hingga berujung pada kehancuran peradaban manusia, pada level nasional kita melihat sistem komunikasi yang buruk mempengaruhi sulitnya suatu bangsa keluar keterbelakangannya. Indonesia dengan sistem komunikasi yang buruk menciptakan ketimpangan pembangunan dan bahkan menciptakan gap yang besar antar

masyarakat desa yang sulit mendapatkan jaringan komunikasi dan informasi dengan kota yang berkembang pesat oleh karena terpenuhinya segala akses komunikasi dan informasi. Berangkat dari kondisi tersebut, maka tulisan ini menjadi relevan selain untuk memperkuat eksistensi manusia sebagai makhluk komunikasi di era digital. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan suatu pemikiran yang konstruktif untuk melakukan pembangun sistem komunikasi yang dengan mengacu pada nilai nilai filosofi Pancasila.

Penelitian ini dilakukan untuk membangun suatu model, strategi atau sistem komunikasi nasional yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila, mengingat tingginya disrupsi informasi dan dinamika politik sosial budaya yang menggiring pembangunan sistem komunikasi dan informasi berbeda secara ideologis dengan ideologi negara yakni pancasila, bahkan sistem komunikasi nasional selalu berubah seiring dengan perubahan kepemimpinan atau rezim, karena berdasarkan literatur sejarah, di era sukarno sistem komunikasi nasional sebenarnya bersifat negara sentris dan sangat kental dengan nilai nasionalisme kemerdekaan. Nururin melihat bahwa di era ini kebebasan diberikan dengan batasan tidak membahayakan kemerdekaan, dan sistem ini terbilang sukses.

Bukti kesuksesan ada pada lahirnya sistem keamanan rakyat yang sangat solit, namun kemudian sistem komunikasi yang ideal untuk bangsa yang baru merdeka dan sedang membangun kemandirian sistem tersebut tidak digunakan dan mengalami pembaharuan berdasarkan kepentingan kekuasaan Suharto semata sehingga sistem komunikasi lebih dinarasikan sebagai sistem komunikasi pembangunan yang sesuai dengan nilai pancasila namun pada kenyataannya pelaksanaan sistem komunikasi menekankan pada otoritarianisme Suharto, berbasis paradigma modernisme Barat, karena jika di era Sukarno rakyat masih diberikan kebebasan sejauh tidak membahayakan kemerdekaan negara, di era suharto justru sebaliknya rakyat dibungkap secara terstruktur, tidak diberikan kebebasan sebaliknya dipandang sebagai objek pembangunan. Buktinya adalah bahwa ketika pemilu di Era Suharto rakyat digiring untuk memilih partai penguasa dan diintimidasi ketika memilih partai yang lain, dan tidak boleh ada kritik pemerintah.

Memasuki Era reformasi, mulai dari kepemimpinan B.J. Habibie, Gusdur, Megawati, SBY hingga Jokowi, kita memasuki era reformasi sehingga sistem komunikasi bersifat sangat terbuka tanpa kontrol, akibatnya sistem komunikasi kita

terjerembab pada sistem komunikasi yang liberal, pada era ini rakyat yang terbelenggu di era Suharto diberikan kebebasan yang cukup besar, maka lahirnya UU kebebasan Pers pada sub sistem komunikasi jurnalisme nasional, yang hakekatnya juga memberikan penegasan perihal hak publik akan informasi publik. Pada era ini nampaknya sistem komunikasi tidak dimanage sesuai dengan nilai nilai pancasila, hal ini yang kemudian melahirkan koreksi terhadap sistem komunikasi kita yang kebablasan hingga membahayakan keberlanjutan bangsa dan negara karena lembaga pers sebagai pilar utama dalam sistem komunikasi telah dimonopoli oleh oligarki.

Masuk pemerintahan Prabowo, sebagai bentuk koreksi terhadap sistem komunikasi di era reformasi yang sangat liberal, nampaknya di Era Prabowo ini sistem komunikasi Indonesia hendak diperbaiki dan kembali pada nilai dasar pancasila, negara sentris namun menyesuaikan dengan sistem komunikasi global dan regional yang mengalami lompatan dasyat setelah era digitalisasi muncul dan mengkonstruksi budaya digital.

Penelitian oleh Wiryany *et al.* (2022) menjabarkan bahwa sistem komunikasi di Indonesia berkembang dinamis. Secara komprehensif Wiyany et al menyatakan bahwa di era 1930 system komunikasi berbasis dari mulut ke mulut, dan system komunikasi langsung, kemudian khusus di kota-kota di Indonesia sistem komunikasi mendapat keberuntungan sehubungan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi sehingga masyarakat kota mendapat kemudahan yang pada akhirnya mengubah bentuk sistem sosial di perkotaan, dan membentuk perubahan dinamika komunikasi di masyarakat perkotaan.

Menurut Wiryany *et al.* (2022) berbeda pada era 1930an, di era 1940an masyarakat Indonesia walaupun mendapat akses terkait perkembangan teknologi infirmasi dan komunikasi, namun masih banyak yang gagap terhadap teknologi. Memasuki era 1950 sistem komunikasi masih sama dan masyarakat pada jaman itu lebih menyadari terhadap hadirnya teknologi informasi dan komunikasi. Pada era 1960 sebagian masyarakat indonesia cukup memahami dan merasa beruntung dapat menggunakan segala bentuk kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi serta mulai merasakan perbedaanya secara langsung dengan menjadi pengguna aktif teknologi informasi dan komunikasi.

Dibalik keuntungan dari teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pada zaman itu, masyarakat yang menggunakan teknologi mulai merasakan ancaman dari teknologi informasi dan komunikasi yang terlihat dari kehilangan moral dan etika, serta menimbulkan dominasi sifat individualisme. Masuk era 1970 muncul pemikiran kritis terhadap perubahan yang ditimbulkan sebagai efek dari teknologi informasi. Pada era 1980 generasi jamannya mulai mengutamakan keseimbangan atas segala sesuatu yang dikonstruksi dan dihasilkan dari perkembangan revolusi teknologi komunikasi dan informasi tersebut. Masuk era 1990an generasi milenial menjadi lebih aktif dan kreatif dalam menggunakan teknologi informasi. Menurut Wiryany *et al.*, di era 1980 -1990an kemajuan teknologi informasi mempengaruhi sistem komunikasi di Indonesia, namun di era tersebut masih banyak yang tidak bisa berekspresi secara bebas, oleh karena regim yang otoriter.

Berangkat dari perkembangan sistem komunikasi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa sistem komunikasi nasional bangsa dan negara Indonesia mengalami perkembangan berdasarkan rezim yang berkuasa dan karena belum terkonstruksi berdasarkan nilai nilai Pancasila sehingga pancasila masih sebatas teoretis dan masih dapat dirumuskan untuk level praktis operasionalisasinya. Hal ini menjadi kekurangan dan menjadi problem yang mempengaruhi rendahnya literasi, dan sulitnya membangun masyarakat akademis, atau *smart City* yang menjadi iming iming dari era digital yang menggadag gadang dapat meningkatkan efisiensi layanan, kualitas hidup warga, serta keberlanjutan lingkungan.

Problem informasi yang dikomunikasikan hanya melalui program entertain dan tidak memiliki nuansa akademis dan pendidikan alias hanya proses wacarnanisasi dan bukan pembahasan ilmiah untuk membuka kebenaran di atas fakta adalah bentuk dari rendahnya sistem komunikasi nasional. Perdebatan seputar ijazah Jikowi merupakan hak publik, dan karenanya perlu dipublis atau tidak? persoalan pemberitaan yang tidak mengkonfirmasi pelaku ataupun korban?, persoalan dualisme data atau perbedaab data antar lembaga pemerintah atau kementerian,? Hak akan informasi publik yang selalu ditutup-tutupi,? Rekayasa isu pada media untuk peralihan isu guna meminimalisir kritik warga oleh lembaga negara, dan upaya pengungkapan kebenaran yang selalu di dibungkam dengan intimidasi aparat,? Hak informasi publik untuk seluruh hasil laporan kepada pihak berwajib yang selalu tidak mendapat jawaban? bahkan transparansi

informasi yang juga belum dijadikan rujukan hak informasi publik di tanah air, merupakan sebagian kecil dari problem sistem komunikasi yang perlu dibenahi di Indonesia.

Problem sistem komunikasi terlihat juga pada perihal kepemilikan media oleh elit politik partai karena dipandang berpotensi bias secara profesional dan mencederai demokrasi politik dan ekonomi di tanah air, dan memungkinkan akan muncul skandal politik dengan *agenda setting* media jurnalistik untuk menggiring opini masyarakat pada hal hal yang tidak substansial bahkan masyarakat hanya disuguhkan program entertainmen tanah air sehingga terkesan mengalihkan isu yang sarat korupsi, kolusi, tipudaya politik ekonomi dan budaya, dengan informasi hiburan. Lawak, dan kontestasi bergensi tanah air. Kualitas argumentasi dalam raung berita dan *talk show* yang ternyata adalah settingan untuk mendapat *viewer* yang menguntungkan perusahaan dan *entertain* media, persoalan film yang tidak realistik dan jauh dari nilai nilai nasionalisme serta pembangunan karakter untuk setiap varian konten film, serta acara debat yang hanya bersifat gurauan atau komedi adalah bukti dari lemahnya sistem komunikasi yang menjamin segala informasi dan proses komunikasi bisa berdampak pada kemajuan bangsa dan negara.

Menyadari kerancuan dalam praktek komunikasi di Indonesia yang menunjukkan lemahnya dan inkonsistensi terhadap sistem komunikasi Indonesia, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata sebagai upaya rekonstruksi sistem komunikasi bangsa yang sesuai dengan nilai pancasila untuk mewujudkan masyarakat komunikatif dan berintegritas di era digital saat ini.

Berangkat latar belakang di atas, maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana sistem komunikasi berdasarkan nilai pancasila pada tataran praktek operasionalnya, dan berkaitan dengan tujuan tersebut maka adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengkonstruksi pemikiran yang bersifat memperkuat sistem komunikasi nasional yang relevan dengan perkembangan zaman berdasarkan nilai nilai pancasila. Penelitian ini dilakukan dengan rumusan masalah adalah” apakah Indonesia memiliki sistem informasi yang berdasarkan nilai-nilai pancasila, dan bagaimana bentuk operasionalisasi dari sistem komunikasi Pancasila

KAJIAN TEORI

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep terkait sistem komunikasi, dan sistem komunikasi Indonesia. Sistem komunikasi merupakan suatu konsep yang secara umum menekankan pada beberapa konsep inti seperti sistem komunikasi tertutup atau terbuka atau semi tertutup atau terbuka yang juga melandasi perihal proses input dan output. Konsep inti kedua meliputi perihal perihal hubungan yang ditekankan pada prinsip interdependensi dimana hal ini melandasi prinsip kebebasan akan informasi dan pentingnya transparansi, disusul konsep inti ketiga terkait umpan balik mekanisme evaluasi kontrol dan perubahan perilaku, dan terakhir berfokus pada dinamisme komunikasi yang menekankan terkait adaptasi, fleksibilitas dan keseimbangan.

Nurudin (2014;4) menyatakan bahwa sistem komunikasi didefinisikan sebagai ;

”Sekelompok orang, pedoman, dan media yang melakukan suatu kegiatan mengolah, menyimpan, menuangkan ide, gagasan, simbol, lambang menjadi pesan dalam membuat keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan dan saling pengertian satu sama lain dengan mengolah pesan itu menjadi sumber informasi.”

Sistem komunikasi Indonesia menurut Nurudin (2014;6) menyatakan bahwa sistem komunikasi Indonesia menjadi sub sistem dari sistem sosial dan sistem politik Indonesia. Lebih lanjut dikatakan bahwa sistem komunikasi Indonesia dapat dibagi menjadi tiga bagian yakni ditinjau dari segi wilayah geografis sistem komunikasi di bagi menjadi dua yakni sistem komunikasi di pedesaan dan perkotaan, dan jika ditinjau dari medianya maka sistem komunikasi di bagi pada sistem media cetak, media tradisional, sedangkan jika ditinjau dari pola komunikasi dibagi pada sistem komunikasi dengan diri sendiri, sistem komunikasi antarpersonal, sistem komunikasi kelompok dan sistem komunikasi massa. Menurut Nurudin (2014;6) Hakekat sistem komunikasi adalah pola hubungan yang saling melengkapi antar sistem dalam sistem komunikasi. Hubungan antar unsur bersifat satu dan tak terpisahkan dan unsur yang lebih rendah mensupport sistem yang lebih besar, sehingga pembangunan sistem komunikasi perlu memahami subsistem komunikasinya.

Sistem komunikasi berhubungan dengan sistem lainnya, oleh karena itu Wiryaningrum *et al* (2022) mengartikan Sistem komunikasi meliputi kondisi dari lingkungan yang sedang berkomunikasi. Wiryaningrum *et al* (2022) menekankan bahwa sistem komunikasi

dipengaruhi oleh sistem sosial dari masyarakatnya. Mengutip Rappaport *et al.*, (2015) Wiryany menjabarkan bahwa, bentuk sistem komunikasi Indonesia kekhasannya terwujud karena keragaman etnis, adat, istiadat, perbedaan desa-kota, dan yang paling menentukan adalah sistem politik yang ditegakkan pada masyarakatnya, dan berdasarkan kekhasan tersebut hasil penelitian Rappaport menegaskan bahwa sistem komunikasi di Indonesia secara geografisnya terbagi menjadi dua yaitu sistem komunikasi pedesaan dan sistem komunikasi perkoataan.

Wiryany *et al.* (2022) menjelaskan perihal landasan sistem komunikasi indonesia itu bahwa "Sistem komunikasi berada di bawah subordinat sistem sosial. Sistem sosial adalah sebuah bangunan sistem yang besar yang di dalamnya mempunyai beberapa subsistem, termasuk sistem komunikasi itu sendiri, sedangkan sistem komunikasi bersama sistem lain merupakan bagian sistem sosial dan karenanya mendukung eksistensi atau keberadaannya secara bersama-sama." Menurut Wiryany (2022) menyimpulkan bahwa indikator mengenai perubahan sistem komunikasi Indonesia ini dapat ditinjau berdasarkan media yang telah hadir dan media yang banyak digunakan, atau dan bahwa sistem komunikasi sangat dipengaruhi oleh keberadaan media massa.

Pandangan Wiryany diperkuat oleh Rafinita Aditia ((2021) yang menyatakan bahwa sistem komunikasi merupakan suatu proses sosial dan politik. Ia (sistem komunikasi) meliputi alat komunikasi yang digunakan manusia, yang dapat bersifat komunikasi asli yang menggunakan faktor diri (*oral/speech/verbal communication and non verbal communication*), ataupun komunikasi dengan menggunakan media (media tradisional maupun media moderen). Aditia ((2021) kemudian menjabarkan bahwa;

"Sistem komunikasi Indonesia terdiri dari komunikasi tradisional dan komunikasi modern yang mendasarkan pada nilai-nilai budaya bangsa, baik secara filosofis, sosial maupun politik yang pada dasarnya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia dengan informasi yang mendidik, menghibur, dan memiliki fungsi kontrol dalam kehidupan bersama, yang melestarikan dan mengembangkan nilai budaya bangsa, membangun watak dan kepribadian bangsa, dan menjadi perekat sosial bagi kesatuan dan persatuan bangsa, intergrasi nasional, kemajemukan masyarakat, dan mendukung

kehidupan ekonomi dan pemerintahan sehingga tercapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dan bermartabat dalam pergaulan antar bangsa.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini di design menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif umumnya dilakukan dengan tujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif subjek penelitian, sedangkan metode kuantitatif berfokus pada pengukuran dan analisis data numerik. Febrianto et al (2024;259). Denzin dan Lincoln (2011), dalam Febrianto et al (2024;260) menyatakan bahwa penelitian kualitatif sering kali melibatkan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kaya dan mendalam tentang konteks sosial yang diteliti. Penelitian kualitatif ini, teknik pengambilan data berbasis data sekunder sehingga merupakan studi kepustakaan atau studi literatur atau analisis dokumentasi, dengan data yang dipilih mengacu pada literatur atau dokumentasi pada media digital dan website. Analisis data dilakukan secara sistimatis meliputi mengorganisasi, menelaah, dan menyimpulkan data sekunder (opini, jurnal, buku, dokumen) untuk menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila sebagai nilai dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia, sudah selayaknya menjadi pedoman umum dalam melandasi dan mengarahkan pola pikir, sikap hingga tindakan tiap Individu masyarakat Indonesia sebagaimana fungsi Pancasila sebagai elemen penunjuk arah (leitstar dinamis), dan elemen pemersatu (meja statis) dalam menghasilkan kehidupan masyarakat yang maju, dan sejahterah.

Pola pikir, sikap dan tindakan yang dijiwai nilai pancasila itulah yang kemudian dapat diakumulasi sebagai suatu budaya bersama bangsa dan negara Indonesia. Pada awalnya ia akan mengkonstruksi sistem nilai namun pada akhirnya kemudian pancasila menjadi dasar hukum, sistem nilai yang mengarahkan perilaku warga negara dan penduduk negara Indonesia.

Sebagai sistem nilai yang meliputi nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis, pancasila melandasi setiap dimensi dan subsistem kehidupan nasional bangsa dan negara. Salah satunya adalah sub sistem komunikasi. Sistem Komunikasi bangsa dan

negara Indonesia sejak awal mengacu pada Pancasila. Hal ini merupakan konsekuensi dari Pancasila dipilih sebagai ideologi dasar, dan ideologi negara Indonesia merdeka. Disinilah kemudian nilai Pancasila menempatkan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia sebagai nilai utama dalam sistem komunikasi Indonesia. Berdasarkan prinsip etis tersebut maka kedudukan Pancasila sebagai filter sekaligus penguat karakter komunikasi bangsa juga menjadi fondasi sistem komunikasi nasional, dan karena itu, nilai-nilai Pancasila memberikan corak tersendiri pada sistem komunikasi nasional yang selanjutnya berbeda atau membedakan sistem komunikasi Indonesia dengan sistem komunikasi pada negara liberal dan berideologi sosialisme demokratis (berbasis agama, suku, dan wilayah) dan ideologi komunis.

Perbedaan yang mencolok adalah terkait filosofi komunikasi, dimana komunikasi dalam perspektif Pancasila menekankan komunikasi tidak sekadar penyampaian pesan, melainkan media atau alat dalam membangun ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa, sarana mewujudkan empati, dan simpati kemanusiaan, sarana membangun kesepahaman, solidaritas, dan identitas nasional, sarana informasi dan interaksi atau komunikasi komunitas dalam rangka menemukan dan mencapai solusi menjawab persoalan masyarakat, dan juga menjadi sarana mewujudkan cita-cita sosialisme nasional. Komunikasi berdasarkan Pancasila juga menekankan pada pembangunan sehingga menjadi salah satu bagian dari nilai yang melandasi berkembangnya paradigma komunikasi pembangunan nasional, sehingga ia menjadi fondasi moral yang mengarahkan bagaimana masyarakat Indonesia berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kemajuan, perkembangan dan keberlanjutan hidup yang ideal.

Nia Kurniasih (2012) mengutip pandangan Arifin A (2011) menjelaskan bahwa ruang lingkup komunikasi membahas terkait beberapa unsur seperti komunikator, komunika, komunikan, media dan efek, tetapi dijabarkan bahwa sistem komunikasi menyentuh seluruh aspek dan dimensi ilmu baik sosial, alam, teknik (tidak terkait aplikasinya) dan lain-lain. Kurniasih menjelaskan juga bahwa disiplin ilmu lain yang bisa dikaji dengan komunikasi meliputi juga ilmu sosiologi, politik, antropologi, hukum, ekonomi, filsafat dan etika. Arifin Kurniasih (2012) menekankan bahwa pembahasan sistem komunikasi Indonesia dititik beratkan pada kondisi di Indonesia saja, sehingga pembahasannya bersifat tidak universal, oleh karena itu sistem komunikasi di Indonesia haruslah bermuara pada sistem komunikasi Pancasila.

Mengutip Arifin (2011), Nia Kurniasih (2012) menjelaskan dalam sistem komunikasi pancasila dapat dibagi dalam beberapa dimensi, seperti komunikasi publik dll. Perihal komunikasi publik yang sesuai nilai pancasila perihal yang ditekankan adalah bahwa sistem komunikasi pancasila menekankan pada sistem komunikasi bersifat terbuka, dengan rambu-rambu yang berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab, sehingga merupakan suatu sistem yang terkontrol bukan oleh kepentingan namun kebutuhan kodrati yang ditekankan pada tanggungjawab.

Membahas terkait dengan rambu rambu, maka menengok pada sejarah maka sejarah UU sistem informasi mengerucut pada tiga UU yang meliputi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) dimana kemudian direvisi menjadi UU No 19 Tahun 2016 dan revisi kedua UU No 1 Tahun 2024. Substansi dari UU ini menekankan pada pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pentingnya keamanan, efisiensi dan keterbukaan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan pelegitimasian terhadap transaksi elektronik dan menjadi bagian dari kegiatan hukum. Undang undang tersebut juga menjadi pegangan dan landasan pembentukan sistem komunikasi nasional yang mengatur tata kelola identitas digital, dan menjadi regulasi komunikasi digital yang bersifat etis dan responsif.

Sistem komunikasi suatu bangsa berbeda dengan lainnya. Menurut Arifin (2011) dalam Nia Kurniasih (2012) menekankan bahwa sistem komunikasi pancasila berbeda dengan sistem komunikasi otoritarian, sistem komunikasi libertarian, sistem komunikasi komunis, atau sistem komunikasi lainnya yang berkembang di dunia saat ini. Dalam hal itu, maka kemudian proses komunikasi pancasila bermuatan berbeda misalnya terkait dengan kepemilikan pers, film, radio dan televisi, namun sistem komunikasi pancasila memiliki kemiripan dengan sistem komunikasi berbasis ideologi liberal yang menekankan pada konsep kebebasan pers (*freedom of the press*), kebebasan berbicara (*freedom of speech*), dan kebebasan berekspresi (*freedom of expression*) yang tercakup dalam nya kebebasan informasi (*freedom of information*).

Terkait perihal kebebasan sebagaimana di maksud di atas, menjadi relevan dan logis bukan karena beragkat dari filosofi liberal atau ciplakan dari konsep liberal dengan menekankan pada hakekat manusia adalah makhluk bebas dan makhluk individual, melainkan lebih menekankan bahwa hakekat manusia sebagai makhluk yang layak diberikan kebebasan untuk berekspresi mencapai perwujudan kodratnya berdasarkan

nilai pancasila, sehingga kebebasan dalam filosofi komunikasi pancasila tidak bertentangan dengan nilai kebebasan yang ditekankan pada ideologi liberal namun memiliki dasar pemikiran yang berbeda.

Terkait dengan kode Etik Jurnalistik dalam kajian Arifin (2011) oleh Nia Kurniasih (2012) menjabarkan bahwa dalam perkembangannya kode etik jurnalisme secara umum merupakan segala hal yang menjadi produk dari sistem pers disertakan dengan tanggung jawab sosial (*Social Res-ponsibility Press*). Kode etik jurnalistik kemudian berkembang pada Sistem Media Demokratik Partisipan. Di Indonesia perihal jurnalistik kemudian berkembang sistem pers yang menekankan pada Teori Pers Pancasila dan bersumber dari filsafat Pancasila, yang kemudian dilandasi dengan ketetapan MPRS.No.XXXII/MPRS/1966 tentang pem-binaan Pers.

Kode etik jurnalistik dalam filsafat pancasila menyebutkan bahwa kebebasan mengeluarkan pikiran di Indonesia melalui pers, namun kebebasan pers harus diimbangi dengan tanggung jawab religius, etika dan tanggung jawab sosial serta tanggung jawab nasional. Konsep kode etik jurnalistik pancasila ini lebih jauh menekankan bahwa sistem penyiaran Indonesia harus tetap menganut keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab dan menunjukkan jati diri bangsa Indonesia dalam pergaulan antar bangsa.

Dalam hal perfilman, Arifin (2011) menjabarkan perihal sistem per-filman Indonesia secara spesifik, yakni Sistem Perfilman Terpimpin dan Sistem Perfilman Pancasila. Sistem perfilman pancasila menekankan perfilman di Indonesia di kembangkan berdasarkan ideologi pancasila dan sesuai dengan kepribadian budaya bangsa dan negara. Sistem Komunikasi Indonesia - meliputi karakteristik radio dan televisi, dinamika penyiaran nasional dan demokratisasi dan peran serta masyarakat.

Mengacu pada penjelasan ini maka kita berkesimpulan bahwa paktek etika jurnalisme sekarang, baik sistem perfilman, karakteristik radio dan televisi serta demokratisasi dan pelibatan peran serta masyarkat sudah sesuai dengan ketimpangan yang masih sarat KKN dan berorientasi pada kapitalisme media semata. Analisis ini merujuk pada persoalan penguasaan media oleh tokoh politik atau wiraswasta yang masuk pada ranah politik, dimana hal ini mempermudah proses kapitalisasi media.

Terkait dengan kualitas, mutu pesan, dari komunikasi, Ellys Lestari Pambayun (2024;444) dalam buku teori komunikasi dalam lima sila: implementasi pancasila

kehidupan berbangsa dan bernegara menekankan bahwa komunikasi dalam perspektif Pancasila harus dipahami sebagai proses ideologis yang menjiwai kehidupan berbangsa. Komunikasi tidak sekadar penyampaian pesan, melainkan sarana membangun kesepahaman, solidaritas, dan identitas nasional, sehingga Lima sila menjadi fondasi moral yang mengarahkan bagaimana masyarakat Indonesia berinteraksi satu sama.

Pambayun (2024) menjabarkan bahwa substansi komunikasi Pancasila meliputi;

Sila pertama, *Ketuhanan Yang Maha Esa*, menekankan bahwa komunikasi harus berlandaskan nilai spiritualitas. Komunikasi yang jujur, beretika, dan penuh keikhlasan mencerminkan penghormatan terhadap Tuhan dan sesama manusia. Dalam praktiknya, komunikasi yang berlandaskan ke-Tuhanan mencegah manipulasi, kebohongan, dan ujaran kebencian. Pambayun (2024) menekankan bahwa komunikasi yang bermoral akan memperkuat kepercayaan sosial. Hal ini menjadi penting di era digital, di mana informasi sering disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Dengan menjadikan nilai ke-Tuhanan sebagai pedoman, komunikasi dapat menjaga integritas dan keadilan. Maka, sila pertama menjadi fondasi yang cukup kuat terkait seni dan etika komunikasi bangsa. Berdasarkan pemahaman ini maka prinsip sila pertama memberikan suatu patokan terkait kualitas komunikasi yang tidak memiliki nuansa dan muatan menghina, menyebut secara tidak hormat, atau menyangkali peran serta Tuhan dalam kehidupan alam semesta.

Sila kedua, *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, menekankan pada sistem komunikasi yang menghargai martabat manusia. Bentuk perwujudannya adalah komunikasi harus mencerminkan empati, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi. Dalam teori komunikasi, hal ini berarti setiap individu diperlakukan sebagai subjek, bukan sekadar objek. Pambayun (2024) menekankan bahwa komunikasi yang beradab akan mencegah diskriminasi dan kekerasan verbal. Komunikasi yang menghargai martabat tentu adalah komunikasi yang adil. Dan komunikasi yang adil juga berarti memberikan ruang bagi semua suara, termasuk kelompok minoritas, maka sila kedua menegaskan bahwa komunikasi harus membangun relasi yang manusiawi. Hal ini penting dan bermanfaat untuk menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman bangsa. Berdasarkan pemahaman ini maka prinsip sila kedua mengharuskan dan mewajibkan setiap individu masyarakat untuk tidak terlena pada tren digital, tetapi tetap konsisten untuk bersuara atas nama kemanusiaan dan keadilan serta peradaban manusia, bangsa dan negara. Pada sisi lain

ditekankan pula agar segala orientasi konten yang hanya memiliki target bisnis dengan dampak yang menghancurkan peradaban kemanusiaan perlu dihindari, sebaliknya setiap konten kreator berlomba dan berkompetisi dalam memproduksi dan mengonsumsi bentuk komunikasi yang lebih berkualitas di takar berdasarkan filosofi dasar nilai-nilai Pancasila.

Sila ketiga Pancasila adalah *Persatuan Indonesia*. Sila ini menekankan komunikasi sebagai perekat bangsa. Indonesia yang multikultural membutuhkan komunikasi yang mampu membangun integrasi dan solidaritas. Pambayun (2024) menekankan bahwa komunikasi Pancasila menekankan adanya keharusan menghindari provokasi yang memecah belah. Narasi kebersamaan, simbol persatuan, dan bahasa inklusif menjadi kunci dalam menjaga persatuan. Komunikasi yang berorientasi pada persatuan akan memperkuat rasa kebangsaan. Hal ini relevan di era politik identitas yang sering memecah belah masyarakat. Dengan menjadikan sila ketiga sebagai pedoman, komunikasi dapat menjadi alat untuk memperkuat integrasi nasional. Berdasarkan pemahaman ini maka prinsip sila ketiga menegaskan substansi komunikasi kebangsaan yang berdiri di atas realitas multikulturalisme yang hidup berkembang di Indonesia, termasuk mengarahkan suatu bentuk komunikasi yang sosialis dan menghindari segala bentuk komunikasi yang egois dan liberalistik. Makna dari pada sistem komunikasi Pancasila ini juga menekankan bahwa individu dan lembaga negara adalah elemen komunikasi yang seimbang untuk pemberi pesan maupun penerima pesan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, oleh karena itu segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan bangsa menjadi hak publik, baik terkait tatakelola lahan, atau rencana pembangunan strategis nasional hal itu menjadi penting dan tidak boleh dikonsumsi sepihak oleh pihak aparaturnegara, mengingat persoalan bangsa merupakan juga persoalan rakyat. Ini menjadi landasan pembangunan sistem komunikasi politik atau sistem komunikasi sosial yang dipercaya menjadi kekuatan kunci dalam pelaksanaan pembangunan. Tidak hanya itu, hal yang ditekankan dari sila ini adalah juga meyakini bahwa media komunikasi menjadi senjata dalam mencapai pembangunan nasional. Sebagaimana dikatakan oleh Dharlinda Suri (2019) bahwa pembangunan nasional akan terwujud dengan baik apabila adanya suatu media komunikasi yang berbentuk jejaring sosial yang digunakan masyarakat dengan benar, beretika dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Sila keempat, *Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan*. Sila ini menekankan komunikasi "politik" harus dilaksanakan dalam prinsip prinsip demokrasi ala Indonesia. Demokrasi ala Indonesia indikatornya adalah demokrasi yang berpihak pada bangsa dan negara (masyarakat Inonesia). Ruang demokrasi Indonesia adalah ruang musyawarah, dan musyawarah sebagai mekanisme komunikasi yang ideal dalam pengambilan keputusan di abad ini. Pambayun (2024) menekankan bahwa komunikasi politik harus terbuka, partisipatif, dan dialogis. Setiap suara rakyat harus didengar dan dipertimbangkan secara adil. Komunikasi musyawarah mencegah dominasi satu pihak dan membangun konsensus bersama. Hal ini penting untuk menjaga legitimasi politik dan kepercayaan rakyat. Dengan demikian, sila keempat menegaskan bahwa komunikasi politik harus berlandaskan kebijaksanaan dan partisipasi. Berdasarkan pemahaman ini, maka prinsip sila keempat menentang komunikasi yang bersifat otoriter, khususnya dalam ruang lingkup atau level sipil, dan juga menekankan suatu piranti dalam komunikasi yang harus dilandaskan pada hikmat dan kebijaksanaan, sehingga pada ruang-ruang sidang, rapat, musyawarah, kongres maupun pemilu, tidak boleh ada upaya praktek pembelian suara, maupun sistem pembungkaman terhadap suara hati nurani masyarakat, sebaliknya diperlukan strategi komunikasi yang mampu melakukan pemurniaan terhadap suara suara rakyat.

Mengacu pada sila keempat pancasila maka sistem komunikasi pancasila menegaskan komunikasi antar lembaga dilakukan dalam sub-sub tersendiri dan berkoordinasi dengan seluruh lembaga terkait dan dipertanggungjawabkan kepada kepala lembaga atau kementerian atau kepala daerah. Terkait dengan hal tersebut, maka sub sistem komunikasi MPR dilandaskan pada sila keempat, dan terkait dengan dengan hubungan MPR dan Presiden maka sistem pertanggungjawaban presiden pada MPR pada kondisi normal bukan hal yang dibenarkan, sebaliknya pertanggungjawaban presiden harus disampaikan kepada seluruh masyarakat dan dilakukan di depan seluruh masyarakat, sebagaimana telah dicontohkan Sukarno bahwa di setiap 17 Agustus ia menyampaikan laporan pertanggungjawaban di depan rakyat Indonesia di depan istana.

Terkait dengan sila ke empat maka salah satu hal yang perlu dikonstruksi sebagai bagian dari sistem komunikasi pancasila adalah penting kolaborasi antara pemerintah dan tiap individu masyarakat dan penduduk Indonesia memanfaatkan

teknologi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mendorong transparansi informasi publik, dan melawan disinformasi dengan informasi yang akurat dan terpercaya.

Sila kelima, *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, menekankan komunikasi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Sila ini menegaskan bahwa sistem komunikasi harus memastikan distribusi informasi yang adil dan akses informasi yang merata bagi semua lapisan masyarakat, sehingga menuntut negara membangun kemandirian bangsa untuk membangun media bigdata termasuk *Artifisial Intelligence* (AI) yang kemudian dapat digunakan oleh masyarakat, sebagaimana dikatakan oleh Aditya, (2021) sebagai alat penunjang komunikasi politik, termasuk dalam isu big data ini adalah jaminan keamanan data pribadi.

Pambayun (2024) menekankan bahwa komunikasi yang berpihak pada keadilan sosial akan memberdayakan masyarakat. Hal ini berarti komunikasi tidak boleh hanya menguntungkan elit, tetapi harus menjangkau rakyat kecil. Komunikasi yang adil juga berarti transparansi dalam kebijakan publik. Sila kelima menegaskan bahwa komunikasi harus menjadi sarana pemerataan dan kesejahteraan. Hal ini penting untuk mencegah ketimpangan sosial. Berdasarkan pemahaman ini maka prinsip sila kelima menekankan pada kualitas komunikasi yang berdampak pada keadilan sosial dan menentang segala bentuk komunikasi yang tidak jujur, manipulatif, tidak mendidik, pembodohan publik, ataupun segala bentuk upaya untuk menciptakan disinformasi nilai kebenaran. Hal ini tentu mengacu pada kepercayaan yang hakikih bahwa informasi dan komunikasi adalah mediator utama pembangunan manusia dan peradaban bangsa. Terkait dengan sila kelima maka suatu hal yang perlu dilakukan adalah penting mendorong kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pemerataan akses internet dan teknologi, mendukung inisiatif pemberdayaan ekonomi dan literasi digital bagi masyarakat marginal khususnya warga 3 T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan) dalam mengejar ketertinggalan.

Sistem komunikasi Pancasila relevan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang membanjir informasi secara cepat, sehingga ia menjadi benteng menghadapi arus globalisasi yang menyesatkan pada satu sisi dan pada sisi lain adanya upaya untuk mewujudkan indonesia Emas 2045. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman sistem komunikasi akan dapat menjaga identitas bangsa. Pambayun (2024) menekankan bahwa komunikasi yang berlandaskan budaya lokal akan memperkuat kepribadian

bangsa. Hal ini penting untuk mencegah homogenisasi budaya Asing, sehingga komunikasi yang berlandaskan Pancasila akan menjaga keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Hal ini diperkuat oleh pandangan Kaswadi *et al.* (2018) terkait pentingnya komunikasi sosial budaya di era globalisasi dalam perspektif nilai pancasila sehingga dapat meningkatkan kreatifitas, menjalin kerjasama, mempelajari karakter manusia, membangkitkan motivasi, mengembangkan bisnis dan mengasah ketrampilan teknologi. Penjabaran dari Luh Suryatni juga menegaskan bahwa komunikasi digital adalah sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai pancasila, dan nilai nilai pancasila menekankan hak dan kebebasan dalam bermedia sosial, namun hal yang ditekankan adalah bahwa penggunaan media digital harus diarahkan pada nilai atau dampak positif dengan upaya yang nyata mencerminkan nilai-nilai budaya pancasila.

Lima sila pancasila menjadi fondasi moral dan ideologis dalam setiap interaksi sosial, termasuk di era digital saat ini. Sebagaimana ditekankan Syahputra *et al.* (2024) bahwa penerapan Pancasila di era digital dimana nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan moral dan etika dalam dunia digital untuk membangun suatu bentuk pelayanan yang kuat beretika. Komunikasi yang berlandaskan Pancasila akan memperkuat demokrasi, persatuan, dan keadilan sosial. Sistem komunikasi pancasila relevan untuk menghadapi tantangan modern seperti globalisasi, politik identitas, dan ketimpangan sosial. Pada sistem komunikasi Indonesia Pambayun (2024) menekankan bahwa komunikasi bukan sekadar teknis, tetapi sarana ideologis yang menjiwai kehidupan berbangsa. Dengan demikian, teori komunikasi dalam Pancasila menjadi investasi bangsa untuk masa depan. Komunikasi yang berlandaskan Pancasila akan menjaga dan mengarahkan Indonesia tetap berdaulat, berdikari, dan berkepribadian nasional sebagaimana menjadi pemikiran Sang Proklamator kemerdekaan Indonesia Bung Karno dalam ajarannya terkait trisakti.

Seiring dengan perkembangan zaman, tulisan Nurudin (2014;206-208) telah menjabarkan bahwa agenda pembangunan sistem komunikasi Indonesia harus diarahkan kepada beberapa Hal pertama sistem komunikasi Indonesia harus memfungsikan partisipasi rakyat secara lebih besar, kedua sistem komunikasi Indonesia terbuka dan harus lebih terbuka ketiga, ruang publik rakyat harus tetap dipertahankan dan diarahkan pada kondisi kekinian dan masa depan, dan keempat bahwa sistem

komunikasi nasional harus menjadi alat pemintal antar sistem dalam masyarakat, dan kelima peran media massa sangat penting ditengah komunitas yang besar. Hal yang diungkapkan Nurudin adalah suatu masukan untuk menjadi gambaran kebijakan nasional ke depan.

Memperkuat hal hal yang telah dijabarkan di atas Ihsani (2025) menyatakan bahwa sila-sila Pancasila menawarkan arahan filosofis bagi pemanfaatan teknologi secara arif, sekaligus membangun kerangka etika digital yang berpondasikan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, namun untuk mewujudkan sistem komunikasi pancasila di era digital yang maju, diperlukan kolaborasi sinergis antar pemangku kepentingan, meliputi pemerintah, lembaga pendidikan, penyedia platform digital, dan masyarakat umum, guna menciptakan ekosistem digital yang tidak hanya produktif tetapi juga berintegritas dan menjunjung tinggi martabat bangsa. Melalui ekosistem digital akan lebih masif mendorong terbangunnya sistem komunikasi pancasila.

SIMPULAN

Sistem komunikasi Indonesia sering terdistorsi dengan nilai ideologi eksternal, oleh karenanya proses bermetamorfosis menciptakan suatu sistem komunikasi yang ideal sesuai dengan nilai nilai Pancasila masih belum terkonstruksi secara baik. Pada sisi lain sistem komunikasi Pancasila yang menekankan komunikasi yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila telah ditetapkan sejak awal kemerdekaan sebagai sistem komunikasi yang setel dan baku untuk Indonesia hingga mencapai kejayaan nasional.

Sistem komunikasi Pancasila merupakan konsep yang menegaskan tentang segala bentuk komunikasi yang dilandasi keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, merupakan konsep yang menegaskan tentang segala bentuk komunikasi yang dilandasi kodrat manusia sebagai makhluk Monopluralis, dan merupakan konsep yang menegaskan tentang segala bentuk komunikasi berbasis kepentingan bangsa, juga merupakan konsep yang menegaskan perihal segala bentuk komunikasi yang berasaskan pada musyawarah untuk mufakat, dan konsep yang menegaskan akan Segala bentuk komunikasi yang dilakukan berorientasi pada keadilan sosial. Berdasarkan penekanan di atas, maka sistem komunikasi pancasila bisa melandasi segala pola komunikasi baik

pola komunikasi intrapersonal, interpersonal, komunitas, kelompok, atau organisasi atau masyarakat.

Komunikasi Pancasila mengakomodir segala bentuk media komunikasi sebagai sarana komunikasi dalam memperkuat iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, penegasan akan Pentingnya kemanusiaan, penegasan akan pentingnya kebangsaan, penegasan akan pentingnya ruang-ruang komunikasi dan penegasan akan orientasi komunikasi untuk mewujudkan keadilan sosial khususnya pada ruang lingkup komunikasi internal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dan komunikasi eksternal dengan masyarakat internasional.

Sistem komunikasi Pancasila berangkat dari indikator manusia sebagai landasan ontologi daripada Komunikasi, landasan epistemologis pancasila adalah mazhab kritis dan konstruktifis dan landasan aksiologis komunikasi pancasila pada seluruh pola komunikasi. Sistem komunikasi Indonesia adalah sistem komunikasi Pancasila karena merupakan sistem yang dibangun di atas nilai nilai pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, kedua bahwa sistem komunikasi pancasila bersifat terbuka, operasional dari sistem komunikasi pancasila menekankan pada seluruh dimensi kehidupan individu manusia, masyarakat, lembaga pemerintahan harus mampu menerjemahkan operasionalisasi sistem komunikasi pancasila pada seluruh bidang dan pola sebagai suatu sistem baku yang lebih bermanfaat dan sangat bermanfaat untuk kemajuan peradaban bangsa secara berkelanjutan. Tantangan Indonesia di tengah arus revolusi digital dari perspektif Pancasila adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memajukan bangsa, maka untuk menciptakan sub sistem komunikasi pancasila dibutuhkan sumber daya manusia pancasila, maka penting menjadi manusia pancasila di era digital untuk dapat mengkonstruksi sistem nilai pancasila di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, G. (2021). Big data dan komunikasi politik di Indonesia: Studi kasus Pilpres 2019 dan RUU Perlindungan Data Pribadi. *ResearchGate, May*.

Andre Febriantoa, RusdyASirojb, Hartatiana. Studi Literatur: Landasan Dalam Memilih Metode Penelitian Yang Tepat *ournal Educational Research and DevelopmentJournal Educational Research and Development Vol.01 No. 01Oktober -Desember2024259Vol. 01 No. 02Oktober –Desember 2024 Page. 259-263. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jerd/article/view/142/140>*

Pembayun, Ellys Lestari dan Nurhayani Saragih, *Teori Komunikasi dalam Lima Sila* (Nuansa Cendekia, hal. 444)

Dharlinda Suri. (2019) Pemanfaatan Media Komunikasi Dan Informasi Dalam Perwujudan Pembangunan Nasional. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*. Juli 2019, Volume 17, No. 2 H. 1-11

Ihsani, H. S. (2025). Relevansi Nilai-Nilai Pancasila dalam Era Digitalisasi. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(11), 89-98.

Kaswadi, Dela Ayu, Eko Wulandari, and Anita Trisiana. "Pentingnya Komunikasi Sosial Budaya Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Nilai Pancasila." *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 6.2 (2018).

Kusuma, Rafles Abdi. 2019. Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Perilaku Intoleransi dan Antisosial di Indonesia, *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*. Vol. 10, no. 2 (2019), pp. 273-290 DOI:<https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.932>

Nia Kurniasih (2012). Sistem Komunikasi Indonesia. Journal article // *Jurnal Sosioteknologi* <https://www.neliti.com/publications/41666/sistem-komunikasi-indonesia#id-section-content> (141-142).

Nurudin (2014). *Sistem Komunikasi Indonesia*. Divisi Buku Perguruan Tinggi. PT. PT Raja Grafindo Persada Jakarta 1-218.

Suryatni, L. (2020). Komunikasi media sosial dan nilai-nilai budaya pancasila social media communications and cultural values of pancasila. *JSI (Jurnal Sistem Informasi) Universitas Suryadarma*, 5(1), 117-133.

Syahputra, A. (2024, January). Penerapan Pancasila di dalam era digital. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi* (Vol. 4, No. 1).

Wiriany Detya, Natasha Selina, Kurniawan Rio. (2022) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap perubahan sistem. *Jurnal Nomosleca*. Oktober 2022; 8 (2) Unmer Malang Hal 242-252).